

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjadi negara maju adalah keinginan di setiap negara berkembang dunia. Di suatu negara berkembang mempunyai ciri dari permasalahan yang terjadi. (Akmal Muzammil, 2021) Pembangunan Ekonomi menggambarkan tahapan pendapatan riil per kapita penduduk yang naik dalam selang waktu tertentu disertai pembaruan dari skema kelembagaan di suatu pemerintahan. (Arsyad Lincoln, 1999) Pembangunan mengarah kepada suatu tahapan multidimensional dengan pembaruan dasar di struktur sosial, tingkah laku sosial dan institusional, diikuti percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan disparitas pendapatan juga penumpasan kemiskinan (Todaro, 2004)

Pembangunan infrastruktur negara berkembang biasanya terfokus hanya pada wilayah kota besar, namun pada wilayah lainnya mengalami keterbelakangan. (Nugraha et al., 2007) menyebut yang termasuk dalam sasaran berpengaruh dalam pembangunan ekonomi yaitu peningkatan perekonomian dengan menandingkan tingkat keberhasilan daerah satu dengan daerah lain dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi juga pendapatan per kapita wilayah. Perekonomian mengalami kemajuan bila taraf ekonomi naik dari yang didapatkan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi termasuk dalam parameter kemajuan pembangunan suatu wilayah dan pembangunan ekonomi menjadi upaya pertambahan pendapatan per kapita dengan memanfaatkan potensi ekonomi melalui penanaman modal, pemanfaatan teknologi canggih, pengembangan keahlian, pertambahan kemahiran, keterampilan berorganisasi dan administratif. (Besar et al., 2013)

Pembangunan ekonomi daerah dapat diamati dari pertumbuhan dan pendapatan suatu wilayah. Pendapatan wilayah berupa Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Disparitas pembangunan ekonomi antara suatu daerah yang tinggi dapat diamati dari adanya kondisi PDRB yang tidak sama pada wilayah tersebut.

Masalah ketidakseimbangan pembangunan wilayah merupakan persoalan bersejarah yang ditempuh tiap wilayah diawali dari cakupan paling kecil kecamatan hingga lingkup global. Terjadinya fenomena ketidakmerataan bersumber dari aspek

kebebasan akses berhubungan dengan wilayah lain dan terjadi sejak lalu. Hal tersebut menyebabkan ukuran pasar yang meluas dikarenakan pemusatan jumlah penduduk pada kawasan yang lebih berkembang walaupun kawasan terbelakang kaya akan sumber daya alam.

Berdasarkan persoalan yang terjadi masuk dalam (UU No. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, n.d.) Kondisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, n.d.) kesenjangan antara Kawasan di Indonesia muncul dari pertengahan tahun 1995 hingga saat ini. Sebagai suatu negara dengan banyak pulau, ketidaksamaan ciri wilayah merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari di Indonesia. Hal ini disebabkan ciri khas suatu wilayah berpengaruh besar dalam menciptakan pola pembangunan. Ketidaksamaan pembangunan yang terjadi berdampak pada kekuatan tumbuh dengan cepat lalu wilayah lain berkembang lama. Kekuatan tumbuh yang tidak sama memicu kesenjangan pembangunan antara daerah ataupun antara pulau (Akmal Muzammil, 2021)

Ketimpangan pembangunan adalah kejadian umum terjadi pada faktor ekonomi wilayah karena adanya ketidaksamaan sumber daya alam di tiap kawasan. Setiap Kawasan memiliki keterampilan yang tidak sama untuk mendukung tahap perkembangan ekonomi. Tiap kawasan mempunyai daerah yang maju (developed region) juga memiliki daerah terbelakang (undeveloped region). (Sjafrizal, 2014)

Douglas C North adalah tokoh yang pertama membahas permasalahan ketimpangan pembangunan di antara suatu wilayah. North menggagas teori mengenai keterkaitan perkembangan ekonomi dan disparitas pembangunan. Teori ini kemudian disebut sebagai teori Neo-Klasik (Sjafrizal, 2018) Di tahun 1960an Williamson mengadakan penelitian mengenai kesenjangan wilayah pada sejumlah negara maju juga negara berkembang dengan tujuan membuktikan kebenaran dari gagasan ini. Williamson menjelaskan jika disparitas regional mayoritas yang terjadi di negara berkembang berada ditingkat bawah jika dibandingkan dengan negara maju.

Menurut Williamson, ketimpangan di suatu wilayah dapat terjadi dikarenakan strategi pemerintah yang diarahkan untuk keseimbangan pertumbuhan daerah juga kesejajaran pendapatan, menemukan sumber daya baru pada daerah terbelakang dan lainnya. (Akai et al., 2005) Myrdal menyatakan, disparitas di suatu Kawasan muncul

dikarenakan ada pemusatan ekonomi yang besar disuatu kawasan tersebut dan mengakibatkan daerah di yang tidak terjangkau mendapatkan akibat yang tidak baik. Disparitas daerah tertentu akan naik jika Sejumlah wilayah bertumbuh menyebabkan wilayah lain mengalami kelumpuhan ekonomi.

Myrdal menjelaskan kawasan yang tertinggal tidak dapat tumbuh seperti Kawasan yang berkembang pesat dikarenakan backwash effect yang menimbulkan wilayah tertinggal menghadapi berbagai kendala untuk mengembangkan potensi perekonomiannya. Lalu menurut teori ketergantungan (dependency theory) yakni ketergantungan menimbulkan dampak negatif untuk negara pinggir (pertanian). Dengan kata lain, definisi pembangunan yang benar berdasarkan gagasan ini yakni pembangunan yang menggabungkan diri di dalam suatu aktivitas ekonomi, dikarenakan pada hakikatnya antar wilayah saling membutuhkan dan lebih baik jika negara-negara tersebut saling melengkapi keterbatasan yang ada namun fakta yang terjadi, justru menimbulkan ketimpangan besar di kedua negara tersebut. Negara yang memiliki fokus utama di bidang industri akan semakin kaya namun negara yang berfokus di bidang pertanian akan tertinggal. Disparitas pembangunan diantara kawasan yang dikemukakan (Sjafrizal, 2012) adalah kejadian yang biasa terjadi pada prosedur pembangunan ekonomi di suatu Kawasan. Disparitas bermula karena ketidaksamaan unsur demografi di setiap wilayah. Alhasil dari ketidaksamaan ini, menimbulkan perbedaan kapasitas suatu wilayah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan tahapan pembangunan

Pada wilayah berkembang, ketimpangan domestik mengalami peningkatan pada tahap pertama pembangunan seiring berjalannya waktu mengalami penurunan hingga tahap pembangunan yang matang (*maturity*). Berdasarkan pendapat Williamson, disparitas turun dikarenakan gagasan pemerintah yang diarahkan untuk kestabilan pembaruan sumber daya dalam Kawasan dengan kondisi berkembang (Akai et al., 2005)

Satu dari beberapa tantangan dalam pembangunan Indonesia masa ini yakni menyelesaikan permasalahan ketimpangan bukan hanya terjadi di dalam lingkup individual atau rumah tangga namun termasuk wilayah. tahap pembangunan yang diwujudkan selama ini nyatanya memicu perkara pembangunan yang rumit. Di mana terjadi ketimpangan yang cukup besar antara wilayah, di mana hal tersebut dipicu oleh

ketidaksamaan karakteristik antar daerah satu terhadap lainnya. Ketimpangan wilayah ditandai dengan ditemukannya wilayah lebih maju dan terdapat daerah tertinggal. Sekalipun ketimpangan sendiri umum terjadi dalam tahapan pembangunan, terutama proses mula-mula pembangunan, namun ketimpangan yang bertambah meluas seharusnya dihindari.

Indonesia termasuk dalam negara berkembang, hal ini menimbulkan kondisi disparitas pembangunan Indonesia mengarah pada disparitas yang besar. Lalu dalam RPJMN 2015-2019 yang disusun tahun 2014, menyebut disparitas pembangunan antar wilayah Indonesia hingga sekarang menjadi persoalan yang wajib tuntas dalam pembangunan di masa yang akan datang. Disparitas antar daerah yang terjadi pada jangka waktu yang lama dapat menimbulkan dampak pada aktivitas sosial masyarakat. Faktanya Disparitas pembangunan antar wilayah Indonesia menduduki posisi terendah jika dilihat dari pertimbangan sejumlah negara maju dan berkembang. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan antar daerah atau provinsi itu tentu terjadi di negara miskin atau negara sedang berkembang, terlebih negara maju tidak terkecuali di Indonesia. Hanya ketidaksamaannya yakni seberapa meningkat tingkat ketimpangan pada daerah itu sendiri.

Lessmann adalah ahli Jerman memberi pernyataan tentang Indonesia adalah outlier disebabkan mempunyai CV1 pendapatan wilayah yang melebihi angka 1 dalam jangka waktu tahun 2004-2008. CV, coefficient of variation merupakan satuan untuk mengamati pengaruh alternatif pengamatan. Didapatkan melalui rasio simpangan baku terhadap rata-rata. Semakin besar nilai CV, artinya observasi makin beragam. Setelah dihitung melalui waktu juga asal data yang serupa, didapat CV pendapatan wilayah lebih rendah Indonesia 0,97; tetapi tertinggi jika dilihat dari negara lain, seperti Thailand dan China situasi pemerataan pembangunan antar wilayah dalam kategori buruk. Bila perhitungan yang lalu yaitu data 1980- 2011, didapat angka CV paling tinggi Indonesia senilai 0,93. rasio PDRB per kapita rata-rata provinsi di Jawa unggul 300 persen dari PDRB per kapita rata-rata provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku di tahun 2011. (Besar et al., 2013)

Permasalahan disparitas pembangunan antar Kawasan di Indonesia dapat diartikan dalam 3 konteks utama yakni Jawa juga selain Jawa, wilayah Barat Indonesia dan wilayah Timur Indonesia, desa ataupun kota. Permasalahan pokok pembangunan

Kawasan di Indonesia sekarang yaitu terdapat disparitas Kawasan yang besar terkhusus disparitas pembangunan wilayah Barat Indonesia dan wilayah Timur Indonesia.

Berdasarkan (UU No 25 Tahun 2004, n.d.) mengenai skema Perencanaan Pembangunan Nasional dan (UU No. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, n.d.) wilayah Barat mencakup Sumatera, Jawa dan Bali. Lalu, wilayah Kawasan Timur termasuk Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara juga Papua.

Isu utama pembangunan nasional menunjukkan besarnya disparitas diantara kawasan khususnya disparitas di antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Hal tersebut ditegaskan didalam RPJPN 2005-2025 yakni tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kestabilan pembangunan dan adil yakni dengan mengurangi kesenjangan wilayah Barat Indonesia serta wilayah Timur Indonesia. Indikasi ketimpangan pembangunan wilayah dari Kawasan Indonesia Barat dan Timur dapat dilihat dalam perbedaan perkembangan ekonomi wilayah (Tim Pokja Sismennas, 2016) memberi dampak kepada pemerintah daerah untuk menyusun strategi pusat pembangunan. Masalah ketimpangan yang terjadi antar wilayah di Indonesia secara luas disebabkan terdapat ketimpangan distribusi SDM, Sumber daya alam, teknologi fisik juga kapital.

Tiap daerah mempunyai ciri yang tidak sama dalam mengatasi rumor ketimpangan pembangunan. (Kamaruddin & Alam, 2018) Akibat adanya tahapan pembangunan yang ditetapkan negara maju menyebabkan disparitas antar kawasan menurun. Konsekuensi dari ketimpangan akan terjadi jika lembah ketimpangan terus meluas akan menyebabkan akan memicu perbedaan kesejahteraan masyarakat, dan adanya perasaan ketidakadilan dalam masyarakat. Ketika terjadi kondisi yang demikian akan rentan menyebabkan konflik.

Tabel 1.1. PDRB, Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita menurut Kawasan tahun 2017-2020

Tahun	PDRB (Milyar Rp)		PDRB PER KAPITA (Ribu Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Kawasan Barat	Kawasan Timur	Kawasan Barat	Kawasan Timur	Kawasan Barat	Kawasan Timur
2017	478530.65	109423.76	43209.9	37781.95	4.87	5.59
2018	504371.5	115495.35	44783.95	39211.03	5.17	6.15
2019	530760.38	119949.65	46525.6	40760.82	4.99	4.38
2020	518540.82	118961.58	46163.06	38841.38	-2.23	-0.25

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2023d, 2023c, 2023a) (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan selama tahun 2017 hingga 2020 PDRB di kawasan barat dan kawasan timur cenderung berfluktuatif, PDRB di tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan sementara itu pada tahun 2020 mengalami penurunan diantara kedua Kawasan. Jika dilihat, PDRB per kapita di kawasan barat cenderung lebih tinggi bila dibandingkan kawasan timur terjadi kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 di kawasan barat dan Kawasan timur Indonesia. Jika diilihat laju pertumbuhan, terjadi kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019 sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan -2.23 persen untuk Kawasan barat dan -0,25 di Kawasan disebabkan pandemi covid-19 yang terjadi saat itu.

Perbedaan SDA dapat mendorong pembangunan ekonomi wilayah tersebut melalui peningkatan mutu SDM yang mempunyai pengaruh dalam pembangunan ekonomi. bila satu Kawasan memiliki dependensi SDA tetapi memiliki mutu individu yang baik, suatu Kawasan bisa mengembangkan daya produksi dan menggerakkan pembangunan ekonomi akibatnya tercipta perekonomian tumbuh tinggi.

Mahardiki menjelaskan solusi menumpas ketimpangan pembangunan, pemerintah wajib menyetarakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan antardaerah. Upaya strategi yang bisa digunakan pemerintah yaitu mengutamakan pembangunan daerah yang terbelakang dan menguatkan peran penduduk untuk mengolah potensi yang tersedia. (Mahardiki, 2013)

Pemusatan aktivitas perekonomian diantara wilayah yang tinggi memicu peningkatan disparitas pembangunan di antara wilayah tersebut dikarenakan tahapan

pembangunan daerah dan pemusatan aktivitas ekonomi rendah mengakibatkan tahapan pembangunan akan berjalan lebih lama. Pembangunan ekonomi yang berhasil menggambarkan kondisi suatu daerah mampu menaikkan pendapatan per kapita menyebabkan pertumbuhan ekonomi ikut meningkatkan mutu SDM.

Ada 17.504 pulau di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2014) merebak menjadi : Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan disebut kepulauan Nusantara. Dengan cakupan Kepulauan Nusantara yang luas, maka pengklasifikasian zona pembangunan penting dilaksanakan untuk mempermudah pertimbangan dan menggali peluang di setiap kawasan. Menurut (Presiden Republik Indonesia, 2022) Kawasan Indonesia terdiri:

- (1) Kawasan Barat , mencakup Jawa, Sumatra, dan Bali.
- (2) Kawasan Timur mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Pada zaman ini, pemerintah daerah terus menerus memperlaju tingkat pembangunan daerah dengan menandingkan satu daerah pada kawasan serupa, juga menandingkan kawasan lain untuk menggambarkan sebatas mana pembangunan ekonomi satu daerah di tingkat kawasan itu. dibutuhkan kerjasama antar daerah, terutama dalam satu wilayah, misal satu kawasan pulau, sub kawasan pulau, juga sebagainya. Menurut latar belakang tersebut topik dari penelitian ini adalah “**Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah (Studi kasus di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kawasan Barat Indonesia pada tahun 2017-2022
2. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2017-2022
3. Bagaimana klasifikasi daerah yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2017-2022

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah ini, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia tahun 2017-2022
2. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia tahun 2017-2022
3. Untuk mengetahui klasifikasi daerah yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2017-2022

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

menjadi alternatif referensi ilmiah untuk pengembangan oleh pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini